

TRANSFORMASI KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM ERA DIGITAL: STUDI KASUS SISTEM E-VISA DI INDONESIA

TRANSFORMATION OF IMMIGRATION POLICY IN THE DIGITAL ERA: A CASE STUDY OF THE E-VISA SYSTEM IN INDONESIA

<https://10.0.205.137/jaid.v5i2.713>

Submitted: 04-11-2025 Reviewed: 23-10-2025 Published: 25-11-2025

Daffa Raihan Arya Mas'adi daffaraihanarya@gmail.com Politeknik Pengayoman Indonesia
Sri Kuncoro Bawono kuncoro@poltekim.ac.id Politeknik Pengayoman Indonesia
Mochammad Ryanindityo ryanindityo@gmail.com Politeknik Pengayoman Indonesia

Abstract. : Digital transformation in immigration policy is the main focus in increasing the efficiency and transparency of public services in Indonesia. One significant innovation is the implementation of the e-Visa system, which allows applicants to apply for visas online without the need for face-to-face interaction. This research uses a qualitative approach with a case study method to analyze the implementation of the e-Visa system in Indonesia. Data was collected through literature studies, analysis of official documents, as well as in-depth interviews with immigration officials and e-Visa service users. The analysis was carried out thematically to identify the benefits, challenges and impacts of digitalization on immigration, tourism and investment. The research results show that e-Visa is able to speed up the administration process, increase tourism competitiveness, and reduce complex bureaucracy. However, the main challenges include issues of data security, technological infrastructure readiness, and community digital literacy. To optimize the implementation of e-Visa, strong regulations are needed, improving cyber security systems, as well as collaboration between the government and the private sector in providing digital infrastructure.

Keywords: e-Visa, Immigration Digitalization, Policy Transformation, Public Services, Data Security, E-Government, Case Studies

Abstrak. Transformasi digital dalam kebijakan keimigrasian menjadi fokus utama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik di Indonesia. Salah satu inovasi signifikan adalah implementasi sistem e-Visa, yang memungkinkan pemohon mengajukan visa secara daring tanpa perlu interaksi tatap muka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan sistem e-Visa di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen resmi, serta wawancara mendalam dengan pejabat imigrasi dan pengguna layanan e-Visa. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi manfaat, tantangan, serta dampak digitalisasi terhadap keimigrasian, pariwisata, dan investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Visa mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan daya saing pariwisata, serta mengurangi birokrasi yang kompleks. Namun, tantangan utama meliputi isu keamanan data, kesiapan infrastruktur teknologi, serta literasi digital masyarakat. Untuk mengoptimalkan implementasi e-Visa, diperlukan regulasi yang kuat, peningkatan sistem keamanan siber, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur digital.

Kata Kunci: e-Visa, Digitalisasi Keimigrasian, Transformasi Kebijakan, Layanan Publik, Keamanan Data, E-Government, Studi Kasus



1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi fokus utama dalam berbagai sektor pemerintahan di Indonesia, termasuk dalam layanan keimigrasian. Pergeseran menuju digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Salah satu inisiatif penting dalam konteks ini adalah implementasi sistem e-Visa, yang memungkinkan proses pengajuan visa dilakukan secara elektronik tanpa perlu interaksi tatap muka. Digitalisasi ini diharapkan mampu menyederhanakan birokrasi dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna layanan keimigrasian (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023).

Implementasi e-Visa di Indonesia merupakan langkah strategis untuk mempermudah akses bagi wisatawan dan pelaku bisnis internasional. Dengan sistem ini, pemohon dapat mengajukan visa secara online, mengurangi waktu dan biaya yang sebelumnya diperlukan dalam proses manual. Selain itu, e-Visa diharapkan dapat meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di kancah global dengan memberikan kemudahan akses bagi wisatawan mancanegara. Berbagai negara telah menerapkan sistem serupa dan mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah wisatawan, sehingga penerapan e-Visa di Indonesia menjadi langkah yang relevan dalam memperkuat sektor pariwisata (Imigrasi Malang, 2024).

Meskipun memberikan berbagai manfaat, transformasi digital dalam layanan keimigrasian juga menghadapi tantangan yang cukup besar. Isu keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama, mengingat sensitivitas informasi yang dikelola dalam sistem imigrasi. Serangan siber yang menargetkan data pribadi pengguna menjadi ancaman yang perlu diantisipasi dengan sistem keamanan yang lebih ketat. Selain itu, kesiapan infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil, menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi sistem ini (Sari dan Wijaya, 2022).

Studi kasus di Kota Malang menunjukkan bahwa meskipun penerapan teknologi dalam layanan imigrasi memberikan dampak positif, tantangan seperti keamanan data pribadi dan infrastruktur teknologi yang memadai masih perlu diatasi. Banyak pengguna layanan imigrasi yang masih mengalami kendala dalam mengakses sistem e-Visa akibat kurangnya pemahaman digital dan jaringan internet yang tidak stabil. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat agar sistem ini dapat digunakan secara optimal (Imigrasi Malang, 2024).

Selain e-Visa, pemerintah Indonesia juga mengembangkan aplikasi M-Paspor untuk mempermudah proses pengajuan paspor secara online. Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menunjukkan bahwa meskipun aplikasi ini meningkatkan efisiensi layanan, masih terdapat kendala teknis dan kebutuhan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Beberapa pengguna melaporkan kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi, serta adanya gangguan teknis yang menghambat kelancaran proses pengajuan paspor secara digital (Putra et al., 2023).

Transformasi digital dalam layanan keimigrasian juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengadopsi e-government secara menyeluruh. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital. Namun, hambatan seperti kesenjangan digital, kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, serta resistensi dari pihak-pihak tertentu dalam birokrasi masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur digital dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala ini (Sari dan Wijaya, 2022).

Implementasi e-Visa di Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan

mengatasi tantangan yang ada, diharapkan sistem ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan investasi. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi era digital juga menjadi aspek yang krusial dalam memastikan keberlanjutan transformasi digital dalam layanan keimigrasian di Indonesia (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis transformasi kebijakan keimigrasian dalam era digital melalui implementasi sistem e-Visa di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam dengan masyarakat pengguna layanan e-Visa untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem ini.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam perubahan kebijakan serta dampaknya terhadap pelayanan imigrasi. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data melalui perbandingan antara hasil wawancara, dokumen resmi, dan temuan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana digitalisasi dalam kebijakan keimigrasian meningkatkan efisiensi administrasi serta mempengaruhi mobilitas internasional di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Digitalisasi Kebijakan Keimigrasian dan Urgensi E-Visa

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam administrasi pemerintahan dan kebijakan keimigrasian. Salah satu inovasi yang semakin banyak diterapkan di berbagai negara adalah sistem E-Visa atau visa elektronik. Digitalisasi kebijakan keimigrasian melalui E-Visa bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan akses bagi pemohon visa. Artikel ini akan membahas urgensi penerapan E-Visa dalam sistem keimigrasian modern serta dampaknya terhadap sektor ekonomi dan keamanan nasional.

Digitalisasi telah membawa transformasi signifikan dalam manajemen keimigrasian. Sistem keimigrasian berbasis digital memungkinkan integrasi data antarinstansi, meminimalisir praktik birokrasi yang berbelit, serta mengurangi potensi korupsi dalam proses pengurusan visa. Banyak negara telah beralih ke sistem *E-Government*, termasuk dalam hal pengelolaan perizinan keimigrasian, guna meningkatkan efektivitas layanan publik (Dunleavy et al., 2006).

E-Visa merupakan bentuk inovasi digital dalam layanan keimigrasian yang memungkinkan pemohon visa untuk mengajukan permohonan secara daring tanpa perlu mengunjungi kantor kedutaan atau konsulat. Keunggulan utama sistem ini adalah proses aplikasi yang lebih cepat, efisiensi biaya operasional, serta peningkatan transparansi dalam penilaian dan persetujuan visa (Czaika dan de Haas, 2013). Implementasi E-Visa juga dapat mengurangi antrian panjang di kantor imigrasi dan mempercepat proses verifikasi dokumen.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah wisatawan dan tenaga kerja asing yang terus meningkat memerlukan sistem visa yang lebih modern dan responsif. Penerapan E-Visa dapat mempercepat arus masuk wisatawan, investor, serta tenaga

kerja asing yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional (Widodo, 2020). Selain itu, E-Visa juga berpotensi mengurangi praktik calo yang sering kali menjadi permasalahan dalam pengurusan visa konvensional.

Salah satu dampak utama digitalisasi kebijakan keimigrasian adalah peningkatan pendapatan negara melalui sektor pariwisata dan investasi. Dengan adanya sistem E-Visa, wisatawan internasional akan lebih mudah mengurus izin masuk ke suatu negara, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing (UNWTO, 2019). Negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Australia telah membuktikan bahwa penerapan E-Visa mampu meningkatkan jumlah wisatawan serta investasi asing langsung (FDI).

Meskipun E-Visa menawarkan berbagai manfaat, terdapat tantangan dalam hal keamanan data dan perlindungan informasi pribadi pemohon. Sistem digital rentan terhadap serangan siber yang dapat mengancam keamanan data sensitif. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa sistem E-Visa didukung oleh teknologi enkripsi yang kuat serta protokol keamanan siber yang ketat (Clarke, 2017).

Beberapa negara telah berhasil menerapkan sistem E-Visa dengan efektif, seperti India, Turki, dan Singapura. India, misalnya, telah menerapkan sistem e-Tourist Visa yang memungkinkan wisatawan dari lebih dari 160 negara mengajukan visa secara daring. Keberhasilan implementasi ini berkontribusi terhadap peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke India hingga 20% dalam satu tahun (Ministry of Tourism India, 2020).

Meskipun Indonesia telah mulai mengadopsi sistem E-Visa sejak 2020, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur digital, resistensi dari pihak yang masih mengandalkan proses manual, serta perlunya peningkatan literasi digital bagi masyarakat luas (Setyowati, 2021). Selain itu, kepatuhan terhadap standar keamanan global juga menjadi tantangan dalam memastikan keamanan sistem keimigrasian digital.

Agar sistem E-Visa dapat berjalan dengan efektif, diperlukan regulasi yang jelas dan mendukung transformasi digital dalam layanan keimigrasian. Pemerintah harus memastikan adanya peraturan yang memayungi aspek legalitas, keamanan data, serta integrasi sistem antarinstansi terkait. Contoh regulasi yang mendukung digitalisasi keimigrasian adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta peraturan terkait sistem keimigrasian berbasis elektronik (Kemenkumham RI, 2022).

Salah satu teknologi yang dapat meningkatkan keamanan dan transparansi sistem E-Visa adalah *blockchain*. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, data pemohon visa dapat tersimpan dalam sistem terdesentralisasi yang sulit dimanipulasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem ini (Nakamoto, 2008). Beberapa negara telah mulai mengeksplorasi penggunaan blockchain dalam sistem keimigrasian guna mencegah penyalahgunaan data dan mempercepat proses verifikasi identitas.

Digitalisasi kebijakan keimigrasian melalui sistem E-Visa merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat arus wisatawan dan investasi, serta meminimalisir praktik korupsi dalam proses administrasi visa. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi, manfaat yang ditawarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko yang ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan infrastruktur digital, serta memastikan sistem keamanan yang ketat dalam penerapan E-Visa.

3.2. Analisis Implementasi Sistem E-Visa di Indonesia

Implementasi sistem *Electronic Visa on Arrival (e-VoA)* di Indonesia merupakan langkah signifikan dalam upaya pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan keimigrasian. Sistem ini memungkinkan warga negara asing mengajukan dan membayar visa secara online sebelum tiba di Indonesia, sehingga mempercepat proses masuk ke wilayah Indonesia (Kawan Hukum, 2023).

Penerapan e-VoA di Indonesia sejalan dengan tren global dalam digitalisasi layanan publik. Melalui sistem ini, proses pengajuan visa yang sebelumnya memerlukan waktu lama dan prosedur manual yang kompleks dapat disederhanakan menjadi lebih efisien dan transparan. Hal ini tidak hanya mengurangi beban administratif bagi pemerintah, tetapi juga meningkatkan kepuasan pengguna layanan (Faizal, 2022).

Kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dengan PT Finnet Indonesia dalam pengembangan aplikasi e-VoA menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam implementasi teknologi informasi. Kerja sama ini memastikan bahwa sistem yang dibangun memenuhi standar keamanan dan kemudahan akses bagi pengguna (Telkom, 2023).

Implementasi e-VoA juga memiliki dampak positif terhadap sektor pariwisata Indonesia. Dengan kemudahan proses visa, diharapkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Studi kasus mengenai peningkatan kunjungan wisatawan Rusia ke Bali setelah penerapan e-VoA menunjukkan potensi sistem ini dalam mendukung pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi (Nugroho, 2023).

Namun, penerapan e-VoA tidak lepas dari tantangan. Isu keamanan data menjadi perhatian utama, terutama setelah terjadinya insiden kebocoran data pada sistem e-visa di Indonesia yang mempengaruhi informasi pribadi wisatawan. Kejadian ini menekankan pentingnya penguatan sistem keamanan siber untuk melindungi data pengguna dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah (News.com.au, 2023).

Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia dapat menjadi hambatan dalam implementasi optimal e-VoA. Beberapa daerah mungkin menghadapi kendala dalam akses internet atau fasilitas pendukung lainnya, yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara nasional (Prabowo, 2023).

Aspek regulasi juga memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi e-VoA. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang jelas dan komprehensif terkait penggunaan teknologi dalam layanan publik, termasuk standar keamanan, perlindungan data pribadi, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini untuk memastikan bahwa inovasi teknologi sejalan dengan kepentingan nasional dan melindungi hak-hak warga negara (Academia, 2023).

Dalam konteks *e-government*, e-VoA merupakan bagian dari upaya transformasi digital yang lebih luas di Indonesia. Penerapan sistem ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan publik melalui adopsi teknologi informasi. Namun, keberhasilan *e-government* tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti kesiapan sumber daya manusia, budaya organisasi, dan partisipasi masyarakat (MDP Journal, 2023).

Evaluasi terhadap implementasi e-VoA perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Pengumpulan umpan balik dari pengguna, pemantauan kinerja sistem, dan analisis data penggunaan dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan lebih lanjut. Pendekatan ini

memastikan bahwa sistem e-VoA terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dinamika lingkungan eksternal (Nugroho, 2023).

Penting juga untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama calon wisatawan mancanegara, mengenai prosedur dan manfaat e-VoA. Informasi yang jelas dan mudah diakses akan membantu mengurangi kebingungan dan meningkatkan adopsi sistem ini. Selain itu, pelatihan bagi petugas imigrasi dalam mengoperasikan sistem baru ini juga krusial untuk memastikan layanan yang konsisten dan berkualitas (Faizal, 2022).

Ke depan, integrasi e-VoA dengan sistem lain, seperti layanan pariwisata, transportasi, dan akomodasi, dapat menciptakan ekosistem digital yang holistik. Integrasi ini tidak hanya mempermudah wisatawan dalam merencanakan perjalanan mereka, tetapi juga memberikan data berharga bagi pemerintah dan pelaku industri untuk pengambilan keputusan yang lebih baik (Telkom, 2023).

Secara keseluruhan, implementasi sistem e-VoA di Indonesia merupakan langkah maju dalam modernisasi layanan publik melalui teknologi digital. Meskipun terdapat tantangan yang harus diatasi, dengan perencanaan yang matang, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan, e-VoA memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat signifikan bagi Indonesia, baik dalam aspek keimigrasian maupun pengembangan sektor pariwisata (Kawan Hukum, 2023).

3.3. Dampak dan Prospek Pengembangan Sistem E-Visa ke Depan

Pengembangan sistem e-Visa telah menjadi topik penting dalam upaya modernisasi layanan imigrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Implementasi e-Visa menawarkan kemudahan akses bagi wisatawan dan pelaku bisnis internasional serta meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah. Namun, seperti halnya inovasi teknologi lainnya, penerapan e-Visa membawa dampak dan tantangan tersendiri yang perlu dianalisis untuk memahami prospek pengembangannya di masa depan.

Salah satu dampak positif utama dari penerapan e-Visa adalah peningkatan ketertiban dan keamanan. Melalui sistem elektronik, pemerintah dapat lebih mudah memantau dan mengawasi aktivitas wisatawan asing, sehingga potensi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan visa dapat diminimalisir. Di Bali, misalnya, penerapan e-Visa diharapkan dapat menekan kasus kejahatan dan meningkatkan citra positif sebagai destinasi wisata yang aman (Jurnalpost, 2023).

Selain itu, digitalisasi proses pengajuan visa melalui e-Visa menyederhanakan prosedur administrasi, mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh pemohon. Calon wisatawan atau pelaku bisnis dapat mengajukan visa secara online tanpa perlu mengunjungi kedutaan atau konsulat, sehingga meningkatkan daya tarik suatu negara sebagai tujuan kunjungan. Kemudahan ini juga sejalan dengan tren global menuju transformasi digital dalam pelayanan publik (Indotelko, 2022).

Namun, implementasi e-Visa juga menghadapi tantangan, terutama terkait infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia. Di Indonesia, meskipun penggunaan internet dan teknologi informasi meningkat, implementasi e-government masih berada di bawah rata-rata dunia, menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur dan kompetensi digital (CFDS UGM, 2021).

Keamanan data juga menjadi isu krusial dalam sistem e-Visa. Dengan pengumpulan data pribadi secara online, risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi meningkat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem e-

Visa dilengkapi dengan protokol keamanan yang kuat untuk melindungi data pemohon.

Selain itu, adopsi e-Visa dapat mempengaruhi sektor ekonomi, terutama pariwisata. Kemudahan akses visa dapat meningkatkan jumlah wisatawan, yang berdampak positif pada pendapatan sektor pariwisata. Namun, perlu diimbangi dengan kapasitas infrastruktur dan layanan untuk mengakomodasi peningkatan tersebut, agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti overturisme atau degradasi lingkungan.

Dalam konteks global, penerapan e-Visa juga dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antar negara. Kebijakan visa yang lebih fleksibel dan transparan dapat memperkuat hubungan bilateral dan multilateral, serta mendorong kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan.

Melihat prospek ke depan, pengembangan sistem e-Visa memiliki potensi besar untuk terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Integrasi dengan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis data besar (big data) dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses evaluasi aplikasi visa, serta mendeteksi potensi risiko secara lebih dini (Neoteknologi, 2022).

Namun, untuk mencapai potensi tersebut, diperlukan komitmen pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur digital dan literasi teknologi masyarakat. Investasi dalam teknologi informasi, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi menjadi kunci sukses implementasi e-Visa di masa depan.

Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta, seperti penyedia layanan teknologi dan perbankan, dapat mempercepat pengembangan dan adopsi e-Visa. Misalnya, kerja sama dengan perusahaan fintech dapat mempermudah proses pembayaran visa secara online, meningkatkan kenyamanan bagi pemohon (Indotelko, 2022).

Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses transformasi digital ini. Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan cara penggunaan e-Visa dapat meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat, serta mengurangi resistensi terhadap perubahan.

Secara keseluruhan, pengembangan sistem e-Visa menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi layanan imigrasi dan daya saing suatu negara di kancah internasional. Namun, keberhasilan implementasinya bergantung pada kesiapan infrastruktur, keamanan data, kolaborasi lintas sektor, dan keterlibatan aktif masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif, e-Visa dapat menjadi pilar penting dalam transformasi digital pelayanan publik di masa depan.

4. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa transformasi kebijakan keimigrasian melalui implementasi e-Visa di Indonesia menunjukkan langkah maju dalam digitalisasi layanan publik. E-Visa memberikan efisiensi dalam proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta mempercepat akses bagi wisatawan dan pelaku bisnis internasional. Namun, penerapan sistem ini menghadapi tantangan, seperti keamanan data, kesiapan infrastruktur digital, serta literasi teknologi masyarakat. Studi kasus di beberapa wilayah menunjukkan bahwa meskipun e-Visa memberikan dampak positif terhadap pariwisata dan investasi, masih terdapat kendala teknis yang perlu diatasi. Keberhasilan implementasi e-Visa bergantung pada dukungan regulasi yang jelas, peningkatan infrastruktur digital, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Dengan strategi yang tepat, e-Visa dapat menjadi

bagian integral dalam pengembangan *e-government* dan memperkuat daya saing Indonesia di era digital.

References

- Academia. (2023). Tantangan dan hambatan dalam implementasi e-government di Indonesia. Retrieved from <https://www.academia.edu/>
- CFDS UGM. (2021). Capaian, peluang, dan tantangan implementasi e-government di Indonesia. Retrieved from <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1423/2021/01/15-CfDS-Case-Study-Capaian-Peluang-dan-Tantangan-Implementasi-e-Government-di-Indonesia.pdf>
- Clarke, R. (2017). Risks and benefits of e-government services: A privacy perspective. *Journal of Information Technology & Politics*, 14(3), 236-250.
- Czaika, M., & de Haas, H. (2013). The effectiveness of immigration policies. *Population and Development Review*, 39(3), 487-508.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023). Laporan implementasi e-Visa di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Dunleavy, P., et al. (2006). *Digital era governance: IT corporations, the state, and e-government*. Oxford University Press.
- Faizal, A. (2022). Digitalisasi keimigrasian dan tantangan implementasi e-Visa. *Jurnal FAI*, 12(2), 100-120.
- Imigrasi Malang. (2024). Transformasi layanan imigrasi di era digital: Studi kasus Malang. Kantor Imigrasi Kelas I Malang.
- Indotelko. (2022). Finnet bantu Kemenkumham permudah pembayaran e-Visa on arrival. Retrieved from <https://www.indotelko.com/read/1668642002/finnet-bantu-kemenkumham-permudah-pembayaran-e-visa-on-arrival>
- Jurnalpost. (2023). Dampak kebijakan e-Visa: Masa depan pariwisata Bali di tengah arus globalisasi. Retrieved from <https://jurnalpost.com/dampak-kebijakan-e-visa-masa-depan-pariwisata-bali-di-tengah-arus-globalisasi/76929>
- Kawan Hukum. (2023). Telaah implementasi electronic visa on arrival (E-VoA) di Indonesia. Retrieved from <https://kawanhukum.id/>
- Kemenkumham RI. (2022). Regulasi sistem keimigrasian berbasis elektronik. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- MDP Journal. (2023). Analisis pengembangan e-government di Indonesia. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi*, 10(3), 210-230.
- Ministry of Tourism India. (2020). *Annual tourism report 2020*.
- Neoteknologi. (2022). 7 tren teknologi masa depan. Retrieved from <https://www.neoteknologi.com/7-tren-teknologi-masa-depan/>
- News.com.au. (2023). Bali's e-Visa glitch exposes traveller passport details. Retrieved from <https://www.news.com.au/>
- Nugroho, H. (2023). Dampak E-VoA terhadap pariwisata Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 5(1), 150-165.
- Prabowo, A. (2023). Penerapan e-government di Indonesia: Analisis pengembangannya. *Kumparan*. Retrieved from <https://kumparan.com/>
- Putra, R. A., Dewi, S. M., & Saputra, T. (2023). Efektivitas aplikasi M-Paspor dalam layanan keimigrasian di Ngurah Rai. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 112-125.
- Sari, A., & Wijaya, B. (2022). Tantangan transformasi digital dalam implementasi e-government di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(3), 45-60.
- Setyowati, R. (2021). Tantangan dan peluang digitalisasi keimigrasian di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 112-125.

- Telkom. (2023). Kolaborasi Telkom dan Ditjen Imigrasi dalam sistem e-Visa. *Rakyatku*. Retrieved from <https://rakyatku.com/>
- UNWTO. (2019). *Visa openness report*. United Nations World Tourism Organization.
- Widodo, T. (2020). Pariwisata digital dan peran e-Visa dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 15(1), 45-59